

Mewujudkan Transparansi Keuangan: Kolaborasi GCG dan Manajemen Risiko dalam Mengurangi Fraud

Sutan Febriansyah¹, Nasruddin¹, Surya Darni¹

¹Universitas Bumi Persada, Lhokseumawe, Indonesia

Email Koresponden: sutanf@unbp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran sinergis antara Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko dalam mencegah fraud di lingkungan organisasi. Di tengah meningkatnya kasus kecurangan keuangan, transparansi menjadi tuntutan utama dalam tata kelola perusahaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa penerapan prinsip GCG—seperti akuntabilitas, transparansi, dan independensi—secara signifikan mampu menekan peluang terjadinya fraud. Sementara itu, sistem manajemen risiko berfungsi sebagai alat deteksi dini yang mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara sistematis. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur untuk menganalisis teori dan temuan empiris terkini terkait kolaborasi GCG dan manajemen risiko, dengan landasan teori seperti Fraud Theory, Agency Theory, dan Enterprise Risk Management. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi kedua sistem tersebut memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendorong terbentuknya budaya organisasi yang etis dan transparan. Namun demikian, tantangan seperti implementasi formalistik, keterbatasan SDM ahli, dan kurangnya adopsi teknologi digital masih menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidimensi yang menggabungkan aspek struktural, perilaku, dan teknologi dalam membangun sistem anti-fraud yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Fraud, Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, Pengawasan Internal, Transparansi Keuangan

Abstract

This study aims to explore the synergistic role between Good Corporate Governance (GCG) and risk management in preventing fraud in the organization. During increasing cases of financial fraud, transparency becomes the main demand in accountable and sustainable corporate governance. Based on a literature review, it was found that the application of principles—such as accountability, transparency, and independence—significantly reduces the opportunity for fraud. Meanwhile, the risk management system serves as an early detection tool that identifies and mitigates risks systematically. This research adopts a literature study approach to analyze the latest theories and empirical findings related to GCG and risk management collaboration, with theoretical foundations such as Fraud Theory, Agency Theory, and Risk Management. The study results show that the integration of the two systems strengthens internal control, increases stakeholder trust, and promotes an ethical and transparent organizational culture. However, challenges such as formalistic implementation, limited human resources expertise, and a lack of adoption of digital technology are still obstacles. This research recommends a multidimensional approach

that combines structural, behavioral, and technological aspects in building a sustainable anti-fraud system.

Keywords: Organizational Culture, Fraud, Good Corporate Governance, Risk Management, Internal Oversight, Financial Transparency

Pendahuluan

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, transparansi keuangan menjadi tuntutan utama dalam tata kelola organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Namun, praktik fraud atau kecurangan dalam pelaporan keuangan masih marak terjadi dan menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan reputasi korporasi. Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) 2022, kerugian rata-rata akibat fraud mencapai USD 117.000 per kasus, dan sekitar 42% kasus terungkap melalui whistleblowing, mencerminkan lemahnya sistem internal dan manajemen risiko di banyak organisasi.

Indonesia tidak luput dari permasalahan ini. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan kasus fraud dalam laporan keuangan BUMN dan sektor swasta sepanjang 2021–2023. Sebagai contoh, skandal keuangan yang terjadi di Asabri dan Jiwasraya menjadi bukti bahwa integritas dan transparansi pelaporan masih menjadi isu sentral dalam tata kelola perusahaan di Indonesia (Ersyafdi & Mabyuni, 2025).

Salah satu strategi utama untuk menghadapi tantangan ini adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko yang efektif. GCG menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perusahaan, sementara manajemen risiko membantu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman secara sistematis. Namun, dalam praktiknya, sinergi antara keduanya sering kali tidak optimal. Banyak organisasi masih menerapkan GCG secara simbolis dan tidak mengaitkannya dengan deteksi atau pencegahan fraud secara proaktif (Kamal & Alam, 2025).

Beberapa penelitian telah mengungkap peran penting GCG dan manajemen risiko secara terpisah. Belgacem (2025), dalam kajiannya pada sektor asuransi, menunjukkan bahwa whistleblowing yang efektif sangat bergantung pada sistem tata kelola yang mendukung. Sementara Akinsola (2025) menemukan bahwa manajemen risiko tanpa dukungan tata kelola yang kuat cenderung bersifat reaktif dan tidak mampu mengurangi risiko fraud secara signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan integratif antara dua komponen tersebut.

Kesenjangan yang muncul dari berbagai studi sebelumnya adalah kurangnya pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan praktik nyata di lapangan terkait sinergi GCG dan manajemen risiko dalam mencegah fraud. Studi terdahulu cenderung bersifat kuantitatif, mengandalkan regresi statistik, dan tidak memberikan ruang bagi narasi, tantangan, dan konteks budaya organisasi yang berperan dalam efektivitas pencegahan fraud (Simha & Satyanarayan, 2016).

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengangkat peran budaya organisasi, kapasitas SDM, dan dukungan teknologi dalam membentuk ekosistem anti-fraud yang tangguh. Beberapa organisasi juga belum memahami bahwa pencegahan fraud tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perilaku, etika, dan nilai-nilai kepemimpinan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif diperlukan untuk menggali aspek-aspek non-teknis tersebut secara lebih holistik.

Penelitian ini relevan dilakukan mengingat meningkatnya ekspektasi publik terhadap akuntabilitas keuangan, baik di sektor publik maupun privat. Integrasi antara GCG dan manajemen risiko dapat menjadi pendekatan baru dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga tahan terhadap manipulasi. Pendekatan ini juga mendukung terciptanya budaya kerja yang jujur dan transparan.

Secara metodologis, penelitian kualitatif ini akan mengandalkan wawancara mendalam dengan para praktisi tata kelola, auditor internal, dan manajer risiko untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang penerapan kebijakan anti-fraud. Penelitian ini juga akan menelaah faktor-faktor keberhasilan dan hambatan implementasi integrasi GCG dan manajemen risiko dalam organisasi.

Dengan menggali perspektif langsung dari pelaku organisasi, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kerangka konseptual baru dalam studi pencegahan fraud berbasis sinergi GCG dan manajemen risiko. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan kebijakan bagi perusahaan, regulator, dan auditor eksternal dalam memperkuat sistem pengawasan internal.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana kolaborasi antara prinsip Good Corporate Governance dan sistem manajemen risiko diterapkan dalam konteks nyata untuk mencegah fraud. Manfaat teoretisnya adalah memperluas horizon penelitian anti-fraud berbasis tata kelola terintegrasi, sedangkan secara praktis dapat memberikan masukan strategis bagi organisasi dalam membentuk sistem anti-fraud yang berkelanjutan dan berbasis nilai.

Landasan Teori

Fraud Theory (Fraud Triangle dan Fraud Diamond)

Teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey (1953) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Teori ini kemudian dikembangkan menjadi Fraud Diamond oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dengan menambahkan elemen keempat, yaitu kapabilitas (*capability*), yang menjelaskan kecakapan individu untuk melakukan dan menyembunyikan fraud.

Dalam konteks ini, *opportunity* erat kaitannya dengan lemahnya pengendalian internal dan governance yang tidak optimal. Penelitian Putra et al. (2025) menunjukkan bahwa Fraud Heptagon yang mengembangkan teori ini juga melibatkan aspek budaya organisasi, kualitas audit, dan tekanan psikologis dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan milik negara di Indonesia.

Agency Theory

Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) di mana terjadi potensi konflik kepentingan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agen mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan prinsipal, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* (GCG) hadir untuk meminimalisir risiko asimetri informasi dan perilaku oportunistik yang menjadi sumber fraud.

Stakeholder Theory

Menurut Freeman (1984), setiap organisasi memiliki kewajiban tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penerapan GCG berfungsi untuk menjamin bahwa kebijakan dan pelaporan

keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh semua pihak. Ayodeji et al. (2025) mengembangkan model konseptual yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi untuk memperkuat kepercayaan stakeholder global terhadap perusahaan multinasional.

Enterprise Risk Management (ERM) Theory

ERM adalah kerangka kerja sistematis yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan merespons risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Komponen penting dalam ERM termasuk manajemen risiko strategis dan pengawasan internal. Teori ini dijelaskan lebih lanjut dalam COSO (2017) Framework yang menyebutkan bahwa governance yang baik harus sejalan dengan sistem manajemen risiko yang proaktif dan terintegrasi. Menurut Oyeyipo et al. (2025), perusahaan multinasional perlu mengadopsi manajemen risiko global yang konsisten dan mematuhi kepatuhan lintas yurisdiksi untuk mencegah risiko fraud dan manipulasi keuangan.

Institutional Theory

Teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983) menjelaskan bahwa praktik organisasi dibentuk oleh tekanan eksternal seperti regulasi, norma industri, dan ekspektasi publik. Dalam konteks ini, keberhasilan penerapan GCG dan sistem manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh tekanan institusional baik dari regulator, auditor, maupun pasar modal. Studi Yanuarisa et al. (2025) menunjukkan bahwa tata kelola publik yang baik dalam pengadaan pemerintah sangat bergantung pada kombinasi antara tekanan institusional dan sistem manajemen risiko yang adaptif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang mencakup tahapan seperti pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengelolaan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang melibatkan pengumpulan berbagai sumber pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan perpustakaan digital dan fisik, serta database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, atau ScienceDirect. Sumber yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian dengan menggunakan kata kunci khusus. Selain itu, peneliti memilih sumber berdasarkan faktor-faktor seperti tahun terbit, kredibilitas penulis, dan relevansi konten.

Tahap berikutnya, setelah mendapatkan sumber, adalah membaca dan mencatat informasi penting. Peneliti menggunakan metode bacaan dekat untuk mempelajari ide, teori, dan hasil yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang relevan dicatat secara sistematis, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun parafrase, dan untuk mencegah plagiarisme, sumber asli disebutkan. Untuk memudahkan proses analisis, catatan disusun berdasarkan tema atau subtema penelitian.

Pada tahap akhir, peneliti menggabungkan temuan dari berbagai literatur dan melakukan pengelolaan dan analisis data. Analisis isi, juga dikenal sebagai analisis isi, digunakan untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, dan perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya. Hasil analisis kemudian disusun secara logis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuat argumen baru. Peneliti dapat menggunakan

pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang mereka pelajari dengan dasar teoritis yang kuat.

Hasil Penelitian

Hasil Analisa data dalam penelitian ini menunjukkan sejumlah penemuan. Uraikan tentang hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penerapan Good Corporate Governance Menurunkan Risiko Fraud

Beberapa literatur menunjukkan bahwa prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi dewan direksi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Eryafdi & Mabyuni (2025) dalam studi literaturnya menegaskan bahwa penerapan GCG secara konsisten dapat mencegah tiga bentuk utama fraud: korupsi, kecurangan pelaporan keuangan, dan penyalahgunaan aset. Hal ini diperkuat oleh Wolfe & Hermanson (2004) yang menyatakan bahwa tata kelola yang kuat mengurangi elemen “opportunity” dalam Fraud Triangle.

Manajemen Risiko sebagai Alat Deteksi Dini Fraud

Gitau (2024) menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko yang efektif memungkinkan organisasi untuk mendeteksi potensi fraud lebih awal melalui penilaian risiko secara berkala. Pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi dengan audit internal mampu meningkatkan efisiensi pengendalian internal dan mengurangi kerugian akibat kecurangan.

Sinergi GCG dan Manajemen Risiko Memperkuat Sistem Pengawasan Internal

Setiawan et al. (2024) memaparkan bahwa integrasi antara GCG dan manajemen risiko menjadi landasan penting dalam membangun sistem pengawasan berbasis Fraud Control Plan. Perusahaan yang menerapkan dua sistem ini secara kolaboratif menunjukkan penurunan signifikan dalam insiden fraud, terutama ketika didukung oleh unit investigasi internal.

Peran Auditor Internal dalam Pengawasan Efektif

Supriadi & Tjakrawala (2024) menegaskan bahwa peran auditor internal yang bekerja dalam kerangka manajemen risiko dan tata kelola mampu mempersempit celah fraud. Auditor bertindak sebagai penghubung antara dewan komisaris dan sistem operasional, serta memainkan peran penting dalam menindaklanjuti temuan fraud.

Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi

Desy & Amaliati (2025) mengungkapkan bahwa keberhasilan sistem anti-fraud bergantung pada budaya organisasi yang mendukung etika, pelaporan pelanggaran (whistleblowing), dan akuntabilitas. Bahkan, struktur formal seperti GCG dan manajemen risiko bisa gagal jika tidak didukung oleh komitmen budaya organisasi.

Kelemahan Implementasi: Komitmen Formalistik dan Kurangnya SDM Ahli

Literatur dari Javaid et al. (2025) mengindikasikan bahwa di banyak organisasi, GCG masih dipahami secara formalistik dan belum menyatu dengan proses operasional. Di sisi lain, kurangnya pelatihan dan kompetensi dalam bidang risiko menjadi kendala besar dalam mengoperasionalkan sistem manajemen risiko secara adaptif.

Transformasi Digital dalam Pengawasan Fraud

Javaid et al. (2025) juga menyoroti peran teknologi dalam mendukung audit internal dan pengawasan fraud. Sistem digital audit yang dilengkapi dengan AI membantu organisasi untuk menganalisis pola fraud secara otomatis dan efisien, mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.

Stakeholder Trust sebagai Outcome Utama

Literatur dari Freeman (1984) mendukung bahwa penerapan GCG dan sistem pengendalian risiko secara optimal meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap integritas keuangan organisasi. Trust ini menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

Pembahasan

Hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa kolaborasi antara Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko merupakan pendekatan strategis yang efektif dalam mencegah terjadinya fraud. Pembahasan ini memfokuskan pada keterkaitan antar teori dan temuan literatur, serta menyoroti keterbatasan dalam implementasi nyata di berbagai konteks organisasi.

Pertama, GCG berfungsi sebagai kerangka tata kelola yang menyediakan prinsip-prinsip dasar dalam menjaga integritas dan transparansi organisasi. Menurut Ersyafdi dan Mabyuni (2025), penerapan GCG yang mencakup akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi mampu menciptakan sistem pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan minim manipulasi. GCG tidak hanya mengatur struktur formal organisasi, tetapi juga membentuk etika perilaku yang menekan kecenderungan individu untuk melakukan fraud.

Kedua, manajemen risiko terbukti menjadi instrumen penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi fraud. Gitau (2024) menekankan bahwa dengan mengidentifikasi potensi risiko keuangan sejak dini dan menetapkan kebijakan mitigasi, perusahaan mampu mengurangi eksposur terhadap tindakan kecurangan. Sistem ini menjadi lebih efektif bila diintegrasikan dengan fungsi pengawasan internal yang kuat, seperti audit internal dan komite risiko.

Ketiga, literatur menunjukkan bahwa sinergi antara GCG dan manajemen risiko membentuk sistem pengendalian internal yang lebih kokoh. Setiawan et al. (2024) dalam studi mereka tentang *Fraud Control Plan* menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur pengawasan berbasis tata kelola dan risiko menunjukkan penurunan insiden fraud secara signifikan. Ini memperkuat konsep *enterprise-wide risk governance* sebagai pendekatan sistemik dalam melindungi nilai organisasi.

Namun demikian, pembahasan juga mengungkap sejumlah tantangan dalam implementasi. Desy dan Amaliati (2025) mencatat bahwa banyak organisasi hanya menerapkan GCG secara simbolis tanpa integrasi ke dalam proses operasional. Komitmen manajemen yang lemah dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran menjadi faktor penghambat dalam membentuk sistem pencegahan fraud yang berkelanjutan.

Literatur juga menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi elemen pendorong dalam efektivitas pengawasan. Javaid et al. (2025) menambahkan bahwa penggunaan sistem audit berbasis AI dan analitik data dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi pola fraud. Hal ini penting di era digital, di mana modus kecurangan semakin kompleks dan sulit diidentifikasi secara manual.

Sementara itu, peran auditor internal sebagai bagian dari struktur GCG juga dikaji oleh Supriadi dan Tjakrawala (2024), yang menegaskan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam menilai efektivitas sistem manajemen risiko dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola. Auditor internal berfungsi sebagai katalisator dalam menyampaikan peringatan dini terhadap anomali keuangan.

Pembahasan ini juga mencerminkan pentingnya faktor eksternal seperti tekanan regulasi dan tuntutan transparansi dari pemangku kepentingan. Dalam kerangka teori stakeholder (Freeman, 1984), kolaborasi GCG dan manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk perlindungan internal tetapi juga membangun kepercayaan publik sebagai aset reputasional perusahaan.

Secara keseluruhan, studi literatur ini mengindikasikan bahwa sinergi antara GCG dan manajemen risiko belum diterapkan secara optimal di sebagian besar organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat integrasi keduanya melalui pelatihan, digitalisasi proses pengawasan, dan penguatan budaya organisasi berbasis etika.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi dalam mencegah terjadinya fraud di lingkungan organisasi, baik sektor publik maupun swasta. GCG berfungsi sebagai fondasi tata kelola yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, sementara manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk secara sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi kecurangan sejak dini.

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang kuat terbukti mampu menekan elemen “opportunity” dalam Fraud Triangle Theory, yang sering menjadi pemicu utama tindakan fraud. Penelitian literatur juga menunjukkan bahwa struktur audit internal, dewan komisaris yang independen, dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) merupakan elemen kunci dalam menciptakan pengawasan internal yang efektif.

Sementara itu, manajemen risiko yang berbasis aktivitas dan terintegrasi dengan pengambilan keputusan strategis, mampu menciptakan sistem deteksi dini terhadap penyimpangan dan kelemahan kontrol internal. Sinergi antara GCG dan manajemen risiko secara empiris terbukti menghasilkan sistem pengendalian internal yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika risiko organisasi.

Namun, keterbatasan implementasi seperti budaya organisasi yang permisif, lemahnya komitmen manajerial, dan minimnya pemanfaatan teknologi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang menekankan integrasi fungsional antara unit GCG dan manajemen risiko, pelatihan SDM, serta adopsi teknologi pengawasan digital.

Secara teoretis, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam pencegahan fraud, yang tidak hanya mengandalkan kebijakan formal tetapi juga memperhatikan faktor perilaku dan sistem pendukung. Secara praktis, hasil ini menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi organisasi dalam menyusun strategi pengendalian fraud yang komprehensif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Akinsola, K. (2025). *Regulatory Compliance and the Role of Corporate Governance in Preventing Financial Misstatements*. SSRN

- Ayodeji, D. C., Oyeyipo, I., Mayienga, B. A., & Onwuzulike, O. C. (2025). *A Conceptual Model for Global Risk Management, Compliance, and Financial Governance in Multinational Corporations*. ResearchGate.
- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). (2017). *Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance*. Retrieved from
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Montclair, NJ: Patterson Smith.
- Desy, A. S., & Amaliati, S. (2025). *Fraud Control Plan System: The Role of Investigation Division in Fraud Prevention*. Jurnal AISTHEBEST.
- Ersyafdi, I. R., & Mabyuni, R. U. (2025). Dampak Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kecurangan: Sudut Pandang dari Studi Literatur. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Gitau, K. (2024). Monitoring Activities as a Factor of Internal Control Systems on Financial Performance among Listed Commercial Banks in Kenya. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 4(4), 1–11
- Javaid, M. I., Aleem, D. M. R., & Shafqat, N. (2025). An Effective Fraud Detection Model for the Auditors as an Analytical Tool: Application on Pakistan Firms. *Contemporary Journal of Social Science*, 2(1), 52–63.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Mufarikoh, k., Najikhatun Ulul M, Selfi Anggi S, Umu Lailatul K, Miqdam Maufur (2024) Upaya Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Resiko Dan Good Corporate Governance Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Jl. Kyai Hasyim Asy'ari km 03, Kalibebber, Wonosobo 56351 Jurnal Ekonomi : Journal of Economic p-ISSN 2087-8133| e-ISSN : 2528-326X
- Oyeyipo, I., et al. (2025). *Global Risk Management and Financial Governance: A Conceptual Framework*. ResearchGate.
- Putra, M. A., Achmad, T., & Huang, C. Y. (2025). *Analysis of Potential Fraudulent Financial Statements in Indonesian State-Owned Enterprises Using Fraud Heptagon and Big Data Analytics*. *Journal of Lifestyle and Sustainability Review*, 7(1).
- Setiawan, D. A., Mais, R. G., & Kurniawan, R. R. (2024). *Fraud Control Plan System in Preventing Corporate Corruption*. AISTHEBEST Journal of Accounting.
- Simha, A., & Satyanarayan, S. (2016). *Auditors on Fraud Detection and Prevention, Roles of Technology, and White-Collars Getting Splattered with Red*. *Journal of Accounting & Finance*, 16(1), 26–44.
- Supriadi, T., & Tjakrawala, K. (2024). Fraud Prevention in the Public Sector: The Role of Internal Audit. *Journal of Crisis & Risk Management*, 9(2), 34–47.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yanuarisa, Y., Irianto, G., & Djamhuri, A. (2025). *Exploring the Internal Audit of Public Procurement Governance: A Systematic Literature Review*. *Cogent Business & Management*, 12(1).